



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2020



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 untuk mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA-PD) Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dimana perubahan tersebut memperhatikan hasil evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dengan format dan sistematika sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini disusun, semoga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

SEKRETARIS DPRD



SYAIFUDDIN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630312 198503 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020	8
2.2. Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan RENJA PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020	20
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
4.1. Program Dan Kegiatan	31
BAB V PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel I	Tabel Pelaksanaan Rencana Kerja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020	9
Tabel II	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	22
Tabel III	Visi, Misi Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	27
Tabel IV	Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	30
Tabel V	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2020 yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja-PD 2020 merupakan dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah tahun 2020 yang memuat perubahan/ pergeseran/ penundaan/ pengurangan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan kerangka ekonomi daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak triwulan pertama tahun 2020, Indonesia bahkan dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus corona yang dikenal dengan COVID-19, yang banyak merubah tatanan kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini tentu berdampak pula terhadap program dan kegiatan pemerintahan termasuk juga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana program dan kegiatan difokuskan untuk penanganan dan pencegahan meluasnya virus corona tersebut. Hampir semua kegiatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan penanganan virus corona dihentikan, dan anggaran dialihkan untuk program dan kegiatan yang dianggap sangat urgent tersebut. Hal ini pun sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat

dimana seluruh kementerian/lembaga baik di pusat maupun di daerah agar melakukan refocussing/realokasi anggaran tahun 2020 untuk disesuaikan dengan penanganan covid-19 serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 tersebut.

Kemudian, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah berjalan selama 1 (satu) semester, untuk kemudian melakukan berbagai penyesuaian sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sehubungan dengan 2 (dua) hal tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan perubahan rencana kerja tahun 2020 dengan melakukan berbagai penyesuaian pada program dan kegiatan, baik dari sisi target yang akan dicapai maupun jumlah anggaran yang dialokasikan.

Penyesuaian yang dilakukan telah disinkronkan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 3 Seri D);

- 15 Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 6 Seri A).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 ini adalah sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan bagi seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020, yaitu :

1. Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
2. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
3. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 dengan substansi dokumen Perubahan Renja Tahun 2020.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja PD, proses penyusunan Perubahan Renja PD, keterkaitan antara Perubahan Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan

2.1. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD

3.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja PD.

4.1. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Memuat komplikasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun n-1 sampai dengan triwulan II Tahun 2019.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan triwulan II tahun 2020, dimaksudkan untuk mengidentifikasi realisasi program/kegiatan yang tidak atau telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya/lebihnya target yang telah direncanakan serta implikasi dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya sehingga dapat mempengaruhi kinerja pelayanan kepada anggota DPRD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja Sekretariat DPRD dapat ditingkatkan lebih efektif dan efisien.

Adapun pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

TABEL 1.
Tabel Pelaksanaan Rencana Kerja PD Sampai Dengan Triwulan II 2020
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Pagu Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran Sampai Dengan TW II Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020			Ket
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	8.715.032.000	4.334.408.626				
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Anggota DPRD dan Pegawai (ASN & THL) Sekretariat DPRD yang terlayani	7.490.000.000	4.093.516.209	265	265	100	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah seragam anggota DPRD dan Pegawai (ASN & THL) Perangkat Daerah	533.682.000	153.000.000	562	90	16	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	350.000.000	5.147.131	80	1	1.25	

					Skoring (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah ()			77	78,97		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah di atas 85%	163.750.000	21.471.743	3	1	33.33	
				Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	177.600.000	43.753.900	7	5	71.43	
				Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	Persentase meningkatnya produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga DPRD	62.741.237.923	21.279.006.883				
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya	Jumlah raperda dan produk hukum yang dibahas	12.902.550.000	3.258.230.861	23	5	21.74	
				Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan (paripurna istimewa/biasa)	346.900.000	14.445.500	15	4	26.67	
				Reses	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	7.135.287.923	1.993.813.9000	3	1	33.33	

				Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat	1.500.000.000	110.112.687	90	5	5.55	
				Rapat Koordinasi Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)	Jumlah rekomendasi / kesepakatan	250.000.000	0	3	0	0	
				Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik	Jumlah tenaga ahli dan kelompok pakar / tim ahli	1.018.100.000	378.350.000	12	11	91.67	
				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum DPRD	Jumlah dokumen/laporan	150.000.000	0	5	0	0	
				Kunjungan Kerja Komisi	Jumlah laporan kunjungan kerja komisi	35.391.538.500	14.591.571.404	384	1.360	354,17	
				Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Musyawarah	1.090.062.500	245.879.602	6	1	16,67	
				Kunjungan Kerja Badan Anggaran	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Anggaran	1.700.000.000	395.023.707	6	1	16.67	
				Kunjungan Kerja Badan Legislasi/BAPEMPERDA	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah	800.000.000	189.327.957	6	1	16.67	
				Kunjungan Kerja Badan Kehormatan	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Kehormatan	299.999.000	96.296.265	6	1	16.67	

				Pembahasan Anggaran Pemprov. Kep. Bangka Belitung	Dokumen nota / kesepakatan	156.800.000	5.955.000	4	1	25	
				Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Kehumasan dan Protokol Dewan	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokol dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	9.504.587.500	2.710.524.123		-		
				Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah publikasi fungsi kelembagaan	2.000.000.000	996.787.517	200	150	75	
					Persentase jumlah sarana prasarana lembaga DPRD	76 %	131,58 %	75			
				Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat	Persentase Pelaksanaan pekerjaan peningkatan sarana prasarana perkantoran	3.989.562.500	786.000.6000	77	24	31.58	
				Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD	Persentase anggota DPRD & ASN yang mendapatkan pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan	3.515.025.000	927.736.006	100	100	100	

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Target Keuangan untuk program pertama ini adalah sebesar Rp.8.715.032.000. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sudah mencapai Rp.4.334.408.626 atau tercapai sebesar 49,37 %.

Ada 5 (lima) kegiatan yang termasuk dalam program Peningkatan Pelayanan Pemerintah, yaitu:

a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.7.490.000.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.4.093.516.209. Persentase realisasi keuangan mencapai 54,65%. Capaian realisasi keuangan tidak terlalu meleset jauh dibandingkan dengan target yang ditetapkan karena memang kegiatan ini lebih bersifat rutin. Capaian realisasi fisik 100% dikarenakan seluruh pegawai yang ada dapat dilayani.

b. Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.533.682.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.153.000.000. Persentase realisasi keuangan mencapai 28,67%. Sebenarnya untuk kegiatan ini sudah sekitar 50% selesai dilaksanakan, namun karena belum adanya tagihan pembayaran yang masuk dari pihak ketiga sehingga realisasi keuangan masih belum dibayarkan. Capaian realisasi fisik mencapai 16%. Dari 562 stel pakaian yang ditargetkan baru 90 stel pakaian yang terealisasi.

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.350.000.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.5.147.131. Persentase realisasi keuangan mencapai 1,47%. Rendahnya capaian realisasi keuangan lebih dikarenakan sejak triwulan I kegiatan ini dihentikan dan sisa dana yang ada dialihkan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19. Untuk realisasi fisik baru mencapai 1,25%. Hal

ini dikarenakan kegiatan ini segera dihentikan sejak mewabahnya covid-19, dan target fisik akan segera dilakukan penyesuaian.

d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.163.750.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 21.471.743. Persentase realisasi keuangan mencapai 13,11%. Seperti halnya kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, rendahnya capaian realisasi keuangan lebih dikarenakan sejak triwulan I kegiatan ini dihentikan dan sisa dana yang ada dialihkan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19. Untuk realisasi fisik baru mencapai 33,33%. Hal ini memang sesuai dengan target awal dimana dari 3 dokumen yang direncanakan untuk diselesaikan pada tahun ini, 2 (dua) diantaranya baru dijadwalkan dilaksanakan mulai triwulan III.

e. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.177.600.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.43.753.900. Persentase realisasi keuangan mencapai 24,63%. Untuk kegiatan ini, sejak triwulan I sudah dihentikan dan sisa dana yang ada dialihkan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19. Realisasi fisik sudah mencapai 71,43%. Masih ada 2 (dua) dokumen lagi yang akan diselesaikan mulai triwulan III.

2. Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan

Target Keuangan untuk program kedua ini adalah sebesar Rp.62.741.237.923. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sudah mencapai Rp.21.279.006.883 atau tercapai sebesar 33,91 %.

Ada 13 (tiga belas) kegiatan yang termasuk dalam program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan, yaitu:

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.12.902.550.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 3.258.230.861. Persentase realisasi keuangan mencapai 25,25%. Untuk realisasi fisik baru mencapai 21,74%. Hal ini dikarenakan sulitnya memprediksi kapan satu rancangan produk hukum dapat diselesaikan. Bisa jadi satu rancangan produk hukum yang dibahas memakan waktu yang lebih panjang dari yang diperkirakan.

b. Rapat-Rapat Paripurna

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.346.900.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.14.445.500. Persentase realisasi keuangan mencapai 4,16%. Rendahnya realisasi keuangan dikarenakan dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan rapat-rapat paripurna sejak mewabahnya covid-19 misalnya pembatasan jumlah tamu yang hadir. Untuk realisasi fisik baru mencapai 26,67%.

c. Reses

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.7.135.287.923 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.1.993.813.900. Persentase realisasi keuangan mencapai 27,94%. Realisasi fisik tercapai sebesar 33,33%. Sampai dengan triwulan kedua, kegiatan reses memang baru dijadwalkan sebanyak 1 (satu) kali.

d. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.110.112.687. Persentase realisasi

keuangan mencapai 7,34%. Realisasi fisik tercapai sebesar 5,55%. Rendahnya capaian realisasi fisik dan keuangan lebih disebabkan karena sejak mewabahnya covid-19, kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang biasanya dilaksanakan di luar kota praktis dihentikan. Untuk itu target fisik dan jumlah anggaran akan disesuaikan kembali.

e. Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Se-Indonesia

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.0. atau kegiatan ini belum dilaksanakan sama sekali. Untuk kegiatan ini memang sangat tergantung kepada undangan dari pihak panitia. Hal ini juga disebabkan oleh mewabahnya covid-19, sehingga pihak panitia belum berani melaksanakan kegiatan ini. Dengan demikian baik realisasi fisik maupun keuangan masih 0 %. Dan akan dilakukan penyesuaian anggaran dan target capaian kegiatan.

f. Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.018.100.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.378.350.000. Realisasi keuangan mencapai 37,16%. Realisasi fisik mencapai 91,67%. Dari target 12 tenaga ahli yang diperlukan baru tersedia sebanyak 11 orang.

g. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum DPRD

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.150.000.000 dan sampai dengan triwulan II masih belum dilaksanakan. Dengan kata lain baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik masih 0%. Untuk kegiatan ini memang sangat tergantung kepada masalah hukum yang terjadi dan harus ditangani di lingkungan DPRD. Hingga laporan ini dibuat, belum ada satupun kasus hukum yang ditangani.

h. Kunjungan Kerja Komisi

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.35.391.538.500 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.14.591.571.404. Realisasi keuangan mencapai 41,23%. Realisasi fisik mencapai 354,17%. Tingginya capaian realisasi fisik ini ada hubungannya dengan mewabahnya covid-19. Awal triwulan II, pimpinan dan anggota DPRD lebih banyak melakukan aktifitas kerjanya di dalam daerah, baik melakukan sosialisasi terkait dengan mewabahnya covid-19, terlebih lagi memantau pelaksanaan penanganan wabah covid-19 di kabupaten-kabupaten. Kegiatan tersebut hampir dilakukan setiap hari secara sendiri-sendiri. Hal inilah yang menyebabkan realisasi fisik melonjak drastis dari target sebelumnya. Untuk itu akan dilakukan penyesuaian target.

i. Kunjungan Kerja Badan Musyawarah

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.090.062.500 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.245.879.602. Realisasi keuangan mencapai 22,55%. Realisasi fisik mencapai 16,67%. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan lebih disebabkan karena mewabahnya covid-19, sehingga kegiatan Alat Kelengkapan Dewan khususnya untuk perjalanan dinas keluar daerah sementara dihentikan dan diganti dengan pemantauan di dalam daerah.

j. Kunjungan Kerja Badan Anggaran

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.700.000.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.395.023.707. Realisasi keuangan mencapai 22,55%. Realisasi fisik mencapai 16,67%. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan lebih disebabkan karena mewabahnya covid-19, sehingga kegiatan Alat Kelengkapan Dewan khususnya untuk perjalanan dinas keluar daerah sementara dihentikan dan diganti dengan pemantauan di dalam daerah.

k. Kunjungan Kerja Badan Legislasi/BAPEMPERDA

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.800.000.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.189.327.957. Realisasi keuangan mencapai 23,66%. Realisasi fisik mencapai 16,67%. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan lebih disebabkan karena mewabahnya covid-19, sehingga kegiatan Alat Kelengkapan Dewan khususnya untuk perjalanan dinas keluar daerah sementara dihentikan dan diganti dengan pemantauan di dalam daerah.

l. Kunjungan Kerja Badan Kehormatan

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.299.999.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.96.296.265. Realisasi keuangan mencapai 32,09%. Realisasi fisik mencapai 16,67%. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan lebih disebabkan karena mewabahnya covid-19, sehingga kegiatan Alat Kelengkapan Dewan khususnya untuk perjalanan dinas keluar daerah sementara dihentikan dan diganti dengan pemantauan di dalam daerah.

m. Pembahasan Anggaran Pemprov. Kep. Bangka Belitung

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.156.800.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.5.955.000. Realisasi keuangan mencapai 3,79%. Realisasi fisik mencapai 25%. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan masih disebabkan karena mewabahnya covid-19. Akan dilakukan penyesuaian khususnya jumlah pagu anggaran .

3. Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Kehumasan dan Protokoler Dewan

Target Keuangan untuk program ketiga ini adalah sebesar Rp.9.504.587.500. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sudah mencapai Rp.2.710.524.123 atau tercapai sebesar 28,52%. Rendahnya ketercapaian target keuangan program secara umum disebabkan oleh

adanya refocussing sejak mewabahnya covid-19 dimana sebagian besar anggaran dari program ini dialihkan untuk penanganan covid 19. Praktis kegiatan yang ada didalam program ini banyak yang tidak dilaksanakan.

Ada 3 (tiga) kegiatan yang termasuk dalam program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Kehumasan dan Protokoler Dewan, yaitu:

a. Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.2.000.000.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.996.787.517. Persentase realisasi keuangan mencapai 49,84%. Capaian realisasi fisik 75%.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.3.989.562.500 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.786.000.600. Persentase realisasi keuangan mencapai 19,70%. Capaian realisasi fisik 24%. Tidak banyak berbeda dengan kegiatan lainnya, rendahnya realisasi fisik dan keuangan disebabkan karena sebagian besar dana dialihkan untuk penanganan covid-19.

c. Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD

Untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.3.515.025.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.927.736.006. Persentase realisasi keuangan mencapai 26,39%. Kegiatan ini juga anggarannya banyak yang dipangkas dan kemudian dialihkan untuk penanganan covid-19. Capaian realisasi fisik 100% dikarenakan seluruh pegawai yang ada dapat dilayani.

2.2. Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan RENJA PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

Beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan baik program/kegiatan yang prioritas maupun yang bersifat penunjang adalah sebagai berikut :

1. Mewabahnya virus corona atau yang lebih dikenal dengan covid-19 menyebabkan terganggunya aktifitas kegiatan yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan ada beberapa kegiatan yang dihentikan sama sekali kegiatannya dan ada juga yang anggarannya dinihilkan. Sedikit banyak hal ini berimbas kepada capaian kinerja;
2. Selain itu, kondisi yang ada menyebabkan terjadinya pergeseran aktifitas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai contoh kegiatan kunjungan kerja keluar daerah selama beberapa bulan tidak dilaksanakan dan kegiatan beralih pada pemantauan dan peninjauan kegiatan di dalam daerah. Hal ini sedikit banyak menimbulkan permasalahan terutama pada ketersediaan anggaran kegiatan dan anggaran kas;
3. Dengan dilakukannya pemangkasan anggaran kegiatan untuk dilakukan pengalihan ke kegiatan yang berdampak langsung dalam penanganan covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan terganggu pelaksanaannya.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, diambil langkah-langka sebagai berikut:

1. Menunda/menghentikan kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan upaya penanganan wabah covid-19. Kegiatan yang dilakukan

adalah kegiatan rutin yang tidak bisa dihindari dan juga kegiatan yang benar-benar prioritas;

2. Melakukan pergeseran anggaran khususnya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah mengingat tingginya aktifitas pimpinan dan anggota dewan ke dalam daerah;

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (riil) dalam Renja PD 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hasil proses membandingkan antara rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah sesuai sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NO	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan 2020					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA				129,461,281,937					105,135,101,365	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				48,500,424,514					39,998,680,757	
	BELANJA LANGSUNG				80,960,857,423					65,136,420,608	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	90%	8,715,032,000	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	90%	7,804,954,774	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prov. Kep. Babel	Jumah Anggota DPRD dan Pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang Terlayani	265 orang	7,490,000,000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prov. Kep. Babel	Jumah Anggota DPRD dan Pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang Terlayani	273 orang	7,200,900,000	
2	Peningkatan Disiplin Aparatur	Prov. Kep. Babel	Jumlah Seragam Anggota DPRD dan Pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah	562 stel	533,682,000	Peningkatan Disiplin Aparatur	Prov. Kep. Babel	Jumlah Seragam Anggota DPRD dan Pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah	225 stel pakaian dinas dan 45 buah atribut pin DPRD	533,682,000	

3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	80 orang	350,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prov. Kep. Babel	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 orang	5,147,131	
			Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	77 Nilai				Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	77 Nilai		
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah di atas 85%	3 Dokumen	163,750,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah di atas 85%	3 Dokumen	21,471,743	
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	7 laporan	177,600,000	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	7 laporan	43,753,900	
	Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan		Presentase meningkatnya produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga DPRD	80%	62,741,237,923	Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan		Persentase Meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD	80%	51,537,411,680	
6	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah raperda dan produk hukum yang dibahas	23 Perda/produk hukum lainnya	12,902,550,000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya	Prov. Kep. Babel	Jumlah raperda dan produk hukum lainnya yang dibahas	10 raperda/produk hukum lainnya	11,902,550,000	

7	Rapat-Rapat Paripurna	Prov. Kep. Babel	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	15 paripurna istimewa / biasa	346,900,000	Rapat-Rapat Paripurna	Prov. Kep. Babel	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	15 paripurna istimewa / biasa	242,830,000	
8	Reses	Prov. Kep. Babel	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari aspirasi masyarakat	3 dokumen/laporan	7,135,287,923	Reses	Prov. Kep. Babel	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari aspirasi masyarakat	3 dokumen/laporan	4,535,287,923	
9	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat	90 orang	1,500,000,000	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Prov. Kep. Babel	Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat	45 orang	303,222,585	
10	Rapat Koordinasi Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah rekomendasi / kesepakatan	3 kesepakatan	250,000,000	Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)	Prov. Kep. Babel	Jumlah rekomendasi / kesepakatan	3 kesepakatan	125,000,000	
11	Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik	Prov. Kep. Babel	Jumlah tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli	7 tenaga ahli dan 5 kelompok pakar/tim ahli	1,018,100,000	Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik	Prov. Kep. Babel	Jumlah tenaga ahli dan kelompok pakar / tim ahli	7 tenaga ahli dan 5 kelompok pakar / tim ahli	1,018,100,000	
12	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum DPRD	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah dokumen / laporan	5 dokumen/laporan	150,000,000	Koordinasi dan Konsultasi Masalah Hukum dan Administrasi Kesekretariatan	Prov. Kep. Babel	Jumlah dokumen / laporan	2 dokumen/laporan	105,000,000	
13	Kunjungan Kerja Komisi	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kunjungan kerja komisi	384 laporan	35,391,538,500	Kunjungan Kerja Komisi	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kunjungan kerja komisi	1.500 dokumen / laporan	29,267,848,672	
14	Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Musyawarah	6 laporan	1,090,062,500	Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Musyawarah	4 laporan	1.090,062,500	

15	Kunjungan Kerja Badan Anggaran	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Anggaran	6 laporan	1,700,000,000	Kunjungan Kerja Badan Anggaran	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Anggaran	4 laporan	1,600,000,000	
16	Kunjungan Kerja Badan Legislasi/BAPEMPERDA	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah	6 laporan	800,000,000	Kunjungan Kerja Badan Legislasi/BAPEMPERDA	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah	4 laporan	800,000,000	
17	Kunjungan Kerja Badan Kehormatan	Luar Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Kehormatan	6 laporan	299,999,000	Kunjungan Kerja Badan Kehormatan	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Kehormatan	4 laporan	450,000,000	
18	Pembahasan Anggaran Pemerintah prov. Kep. Babel	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen / nota kesepakatan	4 dokumen / laporan	156,800,000	Pembahasan Anggaran Pemerintah prov. Kep. Babel	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen / nota kesepakatan	4 dokumen / laporan	97,510,000	
	Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokol Dewan		Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	95%	9,504,587,500	Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Kehumasan dan Protokol Dewan		Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	95%	5,794,054,154	
19	Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prov. Kep. Babel	Jumlah publikasi fungsi kelembagaan	200 Publikasi	2,000,000,000	Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prov. Kep. Babel	Jumlah publikasi fungsi kelembagaan	200 Publikasi	1,552,083,186	
			Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD	77%				Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD	77%		
20	Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat	Prov. Kep. Babel	Persentase Pelaksanaan pekerjaan peningkatan sarana prasarana perkantoran	77%	3,989,562,500	Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat	Prov. Kep. Babel	Persentase Pelaksanaan pekerjaan peningkatan sarana prasarana perkantoran	77%	1,837,253,160	

21	Pelayanan Kerumahtangaan dan Perlengkapan Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD	Prov. Kep. Babel	Persentase anggota DPRD dan ASN yang mendapatkan pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan	100%	3.515.025.000	Pelayanan Kerumahtangaan dan Perlengkapan Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD	Prov. Kep. Babel	Persentase anggota DPRD dan ASN yang mendapatkan pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan	100%	2.404.717.808	
----	-----------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait dengan visi, misi presiden telah tertuang dalam Kebijakan Pemerintah Provinsi yaitu di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 mengenai strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing masing misi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, meliputi :

Tabel 3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan secretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

VISI : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
MISI V : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Meningkatkan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Peningkatan dukungan pelaksanaan fungsi legislasi dan tugas lembaga DPRD serta alat kelengkapan lainnya

Peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga serta keprotokoleran	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga serta keprotokoleran	Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga serta keprotokoleran bagi anggota DPRD	Peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga serta keprotokoleran
Peningkatan jumlah sarana prasarana lembaga DPRD	Meningkatnya jumlah sarana prasarana lembaga DPRD	Meningkatkan sarana prasarana kelembagaan guna mendukung fungsi DPRD	Peningkatan jumlah sarana prasarana lembaga DPRD

Dengan demikian ada keterkaitan dan sinergitas yang jelas antara visi -misi dan agenda Gubernur terpilih serta tujuan, strategi, kebijakan dan program dalam RPJMD dengan Review Renja Sekretariat DPRD. Kajian/telaahan terhadap kebijakan di tingkat Provinsi menguraikan arah kebijakan pembangunan provinsi yang tertuang dalam RPJMD terutama keterkaitan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan peran DPRD sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut memperjelas keterkaitan antara Penyelenggaraan fungsi DPRD dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu di lakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategi daerah yang harus diselesaikan oleh suatu perangkat daerah pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas kecapaian sasaran yang ingin diraih dari masing- masing misi.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam review rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu Tahun 2020 ditetapkan sasaran-sasaran beserta indikator kinerja utama seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun /Rencana Target Kinerja 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kepuasan pelayanan internal oleh Sekretariat DPRD	Nilai kepuasan pelayanan internal oleh Sekretariat DPRD	90%
2	Peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Persentase meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	80%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan acuan atas rencana aksi untuk melaksanakan atau mengoperasionalkan berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Program adalah suatu kumpulan kegiatan yang diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan suatu rencana.

Kegiatan adalah penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian Visi dan Misi perangkat daerah.

Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Utama :

PROGRAM PENGEMBANGAN RISALAH RAPAT DAN KAJIAN PRODUK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

Dengan Kegiatan :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya.
2. Rapat-Rapat Paripurna.
3. Reses.
4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD.
5. Rapat Koordinasi Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
6. Penyediaan Tenaga Ahli & Kegiatan Akademik.

7. Koordinasi & Konsultasi Masalah Hukum dan Administrasi Kesekretariatan.
8. Kunjungan Kerja Komisi.
9. Kunjungan Kerja Badan Musyawarah.
10. Kunjungan Kerja Badan Anggaran.
11. Kunjungan Kerja Badan Legislasi/Badan Pembentukan Perda.
12. Kunjungan Kerja Badan Kehormatan.
13. Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov. Kep. Babel.

2. Program Pendukung

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN, KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DEWAN

Dengan Kegiatan :

1. Publikasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat.
3. Pelayanan Kerumahtanggaan

3. Program Pendukung :

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH

Dengan Kegiatan :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Disiplin Aparatur.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
5. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tabel 5. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2020
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2020				Catatan Penting	Rencana Pagu Anggaran Perubahan 2020		Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2020	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELANJA				129,461,281,937				105,135,101,365	
BELANJA TIDAK LANGSUNG				48,500,424,514				39,998,680,757	
BELANJA LANGSUNG				80,960,857,423				65,136,420,608	
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	<i>Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD</i>		90%	8,715,032,000	APBD		90%	7,804,954,774	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Anggota DPRD dan Pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang Terlayani	Prov. Kep. Babel	265 orang	7,490,000,000	APBD		273 orang	7,200,900,000	
Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Seragam Anggota DPRD dan Pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah	Prov. Kep. Babel	562 stel	533,682,000	APBD		225 stel pakaian dinas dan 45 buah atribut pin DPRD	533,682,000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Luar Prov. Kep. Babel	80 orang	350,000,000	APBD		1 orang	5,147,131	

	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD		77 Nilai				77 Nilai		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah di atas 85%	Prov. Kep. Babel	3 Dokumen	163,750,000	APBD		3 Dokumen	21,471,743	
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Kep. Babel	7 laporan/dokumen	177,600,000	APBD		7 laporan	43,753,900	
Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	Persentase Meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD		80%	62,741,237,923	APBD		80%	51,537,411,680	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya	Jumlah raperda dan produk hukum lainnya yang dibahas	Luar Prov. Kep. Babel	23 Perda/produk hukum lainnya	12,902,550,000	APBD		10 raperda/produk hukum lainnya	11,902,550,000	
Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	Prov. Kep. Babel	15 paripurna istimewa / biasa	346,900,000	APBD		15 paripurna istimewa / biasa	242,830,000	
Reses	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari aspirasi masyarakat	Prov. Kep. Babel	3 dokumen/laporan	7,135,287,923	APBD		3 dokumen/laporan	4,535,287,923	
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat	Luar Prov. Kep. Babel	90 orang	1,500,000,000	APBD		45 orang	303,222,585	

Rapat Koordinasi Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)	Jumlah rekomendasi / kesepakatan	Luar Prov. Kep. Babel	3 kesepakatan	250,000,000	APBD		3 kesepakatan	125,000,000	
Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik	Jumlah tenaga ahli dan kelompok pakar / tim ahli	Prov. Kep. Babel	7 tenaga ahli dan 5 kelompok pakar / tim ahli	1,018,100,000	APBD		7 tenaga ahli dan 5 kelompok pakar / tim ahli	1,018,100,000	
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum DPRD	Jumlah dokumen / laporan	Luar Prov. Kep. Babel	5 laporan	150,000,000	APBD		2 dokumen/ laporan	105,000,000	
Kunjungan Kerja Komisi	Jumlah laporan kunjungan kerja komisi	Luar Prov. Kep. Babel	384 laporan	35,391,538,500	APBD		1.500 dokumen / laporan	29,267,848,672	
Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Musyawarah	Luar Prov. Kep. Babel	6 dokumen /laporan	1,090,062,500	APBD		4 laporan	1.090,062,500	
Kunjungan Kerja Badan Anggaran	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Anggaran	Luar Prov. Kep. Babel	6 dokumen /laporan	1,700,000,000	APBD		4 laporan	1,600.000,000	
Kunjungan Kerja Badan Legislasi/BAPEMPERDA	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Luar Prov. Kep. Babel	6 dokumen /laporan	800,000,000	APBD		4 laporan	800,000,000	
Kunjungan Kerja Badan Kehormatan	Jumlah laporan kunjungan kerja Badan Kehormatan	Luar Prov. Kep. Babel	6 dokumen /laporan	299,999,000	APBD		4 laporan	450,000,000	

Pembahasan Anggaran Pemerintah prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen / nota kesepakatan	Prov. Kep. Babel	4 dokumen / laporan	156,800,000	APBD		4 dokumen / laporan	97,510,000	
Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokol Dewan	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokol dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah		95%	9,504,587,500	APBD		95%	5,794,054,154	
Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah publikasi fungsi kelembagaan	Prov. Kep. Babel	200 Publikasi	2,000,000,000	APBD		200 Publikasi	1,552,083,186	
	Persentase jumlah sarana prasarana lembaga DPRD		77%		APBD		77%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat	Persentase Pelaksanaan pekerjaan peningkatan sarana prasarana perkantoran	Prov. Kep. Babel	77%	3,945,442,000	APBD		77%	1,837,253,160	
Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD	Persentase anggota DPRD dan ASN yang mendapatkan pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan	Prov. Kep. Babel	100 %	3.515.025.000	APBD		100 %	2.404.717.808	

BAB V

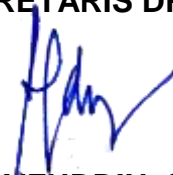
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2020 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen strategis yang disusun berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Disadari bahwa dalam perjalanannya nanti tidak terlepas dari kelemahan, kekurangan, hambatan dan kendala yang akan dihadapi dan kiranya dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana serta mendapat dukungan semua pihak.

Keberhasilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menjalankan hak dan kewajiban konstitusinya merupakan keberhasilan pimpinan dan anggota dewan sendiri. Sementara dalam proses pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ada kekurangan merupakan kekurangan kami di Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayan administrasi kepada Dewan. Sekretariat DPRD hanya berusaha untuk mewujudkan pelayanan prima terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga terlaksana.

SEKRETARIS DPRD



SYAIFUDDIN, SH
NIP. 19630312 198503 1 013